



PROSIDING
KONGRES PANCASILA XI

Aktualisasi Pancasila dalam Merajut Kembali Persatuan Bangsa

Balai Senat, Universitas Gadjah Mada
15 -16 Agustus 2019

Diterbitkan
PUSAT STUDI PANCASILA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2020

ISBN: 978-602-7918-17-7

**PROSIDING
KONGRES PANCASILA XI**

**“AKTUALISASI PANCASILA DALAM MERAJUT KEMBALI PERSATUAN
BANGSA”**

Balai Senat, Universitas Gadjah Mada

15-16 Agustus 2019

Diterbitkan

Pusat Studi Pancasila
Universitas Gadjah Mada

2020

**PROSIDING KONGRES PANCASILA XI
“AKTUALISASI PANCASILA DALAM MERAJUT KEMBALI PERSATUAN
BANGSA”**

ISBN: 978-602-7918-17-7

Susunan Panitia:

Ketua	: Agus Wahyudi, M.Si., MA, Ph.D
Sekretaris	: Achmad Munjid, Ph.D
Bendahara	: Drs. Mustofa Anshori Lidinillah, M.Hum.
Wakil Bendahara	: Endah Agustiani, M.Phil
Sie Ilmiah	: Dr. Sindung Tjahyadi, M.Hum
Anggota	: Dr. Hastangka M.Phil Hendro Muhaimin, M.A
Sie Sidang	: Diasma Sandi Swandaru, M.H
Anggota	: Rona Utami, M.A
Sekretariat	: Surono, M.A
Sie Pendaftaran	: Hari Widodo, S.IP
Anggota	: Rakha Imadi Fadli, S.H Fendi Diansyah, S.Fil Milla W, M.Phil Moh Rifai

Steering Committee:

Prof. dr. Sutaryo, Sp.A(K) | Prof. Dr. Koento Wibisono | Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng.,Ph.D. |
Prof. Dr. Ir. Sunjoto, Dip.HE, DEA | Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, MA | Prof. Dr.
Sudjito, S.H., M.Si | Prof. Dr. Wuryadi, M.S | Prof. Dr. Ir. Putu Sudira, M.Sc. | Dr. Sindung
Tjahyadi, M.Hum | Dr. Heri Santoso, M.Hum.

Editor: Hendro Muhaimin, Moh Rifai

Reviewer: Rakha I.F, Diasma Sandi Swandaru

Penerbit:

Pusat Studi Pancasila

Jl. Podocarpus II D-22 Bulaksumur Yogyakarta 55281
Telp./Faks. +62 (274) 553149
Email: ps.pancasila@ugm.ac.id

Cetakan pertama, Februari 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada

Daftar Isi

Rumusan dan Deklarasi Kongres Pancasila XI

Makalah Narasumber

- Revitalisasi Wawasan Kebangsaan (Pancasila, NKRI, UUD 1945 Dan Bhinneka Tunggal Ika)
Oleh **Azyumardi Azra, CBE**
- Tantangan Dan Keselarasan Agama Dan Pancasila
Oleh **Sudarnoto Abdul Hakim**
- Pancasila Sebagai Spiritualitas Bangsa: Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu dalam Membangun Kebangsaan yang Sehat
Oleh **Hariyono**

Tema 1 Tantangan dan Keselarasan Agama dengan Nilai-Nilai Pancasila

- Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Dialog Lintas Iman Untuk Mengatasi Konflik Atas Nama Agama Di Indonesia
Oleh **Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba**
- Pancasila Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum: Upaya Menjamin Rasa Toleransi Dalam Rangka Mempertahankan Identitas Nasional (Sara)
Oleh **Ahmad Adi Fitriyadi**
- Budaya Hukum Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Dalam Membendung Intoleransi Demi Mempertahankan Identitas Nasional (Sara)
Oleh **Fakhris Lutfianto Hapsoro**
- Merawat Keberagaman Dan Mengelola Keragaman Dalam Perspektif Pancasila
Oleh **Junaidi, S.Ag., M.Hum., M.Kom**
- Penerapan Syariat Islam Sebagai Wujud Rekonstruksi Pancasila (Kajian Insaider)
Oleh **Aida Hayani dan M. Khairul Hadi Al Asy Ari**
- Politik Uang Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Dan Dampaknya Pada Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Desa Kuncen, Ceper, Klaten)
Oleh **Novianto Ari Prihatin, SS.**
- Tantangan Elit Menjawab Ketahanan Dan Kesatuan Bangsa
Oleh **Muhammad Ma'ruf**
- Agama Dalam Kuasa Politik: Sebuah Telaah Filosofis Tentang Peran Agama Dalam Pemilu 2019
Oleh **Andreas Doweng Bolo**
- Sara Ku Sayang Sara Ku Malang
Oleh **Dr. E. Handayani Tyas, S.H., M.Pd**

- Kelayakan Dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Yang Majemuk (Tinjauan Secara Historis, Yuridis, Dan Aksiologis)
Oleh **Paulus Wahana**
- Radikalisme Indonesia Dan Zona Pancasila
Oleh **Sahru Romadloni**
- Tantangan Dan Dinamika Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Dalam Mempertahankan Identitas Nasional Dalam Sudut Pandang Hukum Konstitusi
Oleh **Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, SH., MH.**
- Pancasila Sebagai Living Values Dan Common Denominator Dalam Pengalaman Sejarah Kebangsaan Indonesia
Oleh **Nur Fatah Abidin, S.Pd., M.Pd.**

Tema 2 Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa dalam Mempertahankan Identitas Nasional

- Perwujudan Ekonomi Pancasila Melalui Economic Civic (Ekonomi Warga Negara) Di Era Otonomi Daerah
Oleh **Drs. Nana Setialaksana, M.Pd**
- Pemilu 2019 dan Pendidikan Demokrasi Pancasila
Oleh **Kosasih Adi Saputra, S.Pd., M.Pd.**
- Penguatan Pendidikan Multikultur Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-nilai Pancasila di Sekolah Melalui Kegiatan Bina Rohani
Oleh **Deny Satrio Aji**
- Indonesia sebagai Negara Bangsa-bangsa
Oleh **Wilson M.A. Therik**
- Sukoreno dan Desa Pancasila: Studi Membangun Nilai-nilai Pancasila dan Prularisme Pendidikan di Ujung Timur Jawa
Oleh **Afifatul Munawiroh, Siti Choitrotul Ula dan M. Khoirul Hadi Al-Asyari**
- Penerapan Model Belajar Berbasis Riset dalam Membudidayakan Nilai-nilai Pancasila pada Mahasiswa
Oleh **Novitasari**
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Berasaskan Pancasila
Oleh **James Marihot Panggabean**
- Redefinisi Makna Kebebasan Berserikat guna Menjaga Marwah Ideologi Pancasila Melalui Peranan TAP MPR yang bersifat Mengatur sebagai Bentuk Aerodinamika Hukum
Oleh **Nurul Ula Ulya**
- Penguatan Ideologi Pancasila: Implementasi Belajar Berbasis Riset (Bbr) Sebagai Defensi Ancaman Disintegrasi Bangsa Di Era Industri 4.0.
Oleh **Achmad Busrotun Nufus dan Novitasari**
- Akademia Desa Sebagai Forum Komunikasi Pembangunan Desa
Oleh **Dr. Chontina Siahaan, SH., M.Si**
- Ekonomi Dan Pergulatan Wacana Koperasi di Indonesia
Oleh **Anggalih Bayu M. Kamim dan M. Adrian Gifariadi**
- Demokrasi Politik Berperspektif Feminis
Oleh **Bernadus Wibowo Suliantoro, Caritas Woro Murdiati R. dan Marietta D Susilawati**

AKADEMIA DESA SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DESA

Dr. Chontina Siahaan, SH., M.Si

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB)
e-mail: Chontinasiahaan58@gmail.com dan lppkb@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu program kerja pemerintah tahun 2019 s.d. 2024 adalah pembangunan Sumber Daya Manusia di samping tetap meneruskan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kota dan desa. Desa perlu dibangun agar masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Ketertinggalan desa dapat diatasi jika masyarakat desa mengubah mindset/pola berfikir yang mengatakan bahwa hanya di kota lah bisa mencari pekerjaan yang layak, hidup sejahtera dan bahagia. Potensi desa dapat digali untuk mensejahterakan masyarakat desa asal sumber daya manusianya mampu untuk membangun desa dengan menghasilkan produk desa melalui aktivitas penyelenggara desa. Tujuan Penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memperkenalkan konsep akademia desa sebagai wadah atau tempat komunitas berkumpul para penyelenggara desa yang duduk bersama dalam membicarakan dan membuat program kerja untuk pembangunan desa. Metode penulisan makalah ini adalah deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan konsep-konsep akademia desa, bagaimana mewujudkan akademia desa, konsep penggerak desa, pemimpin penggerak, koordinator penggerak dan pembina penggerak desa dengan indikator kompetensi yang harus dimiliki sebagai tolok ukur keberhasilan Akademia Desa.

Hasil dari penulisan makalah ini menjelaskan bahwa pembangunan bangsa dan negara diawali dari desa karena desa merupakan miniatur negara. Di samping itu, desa merupakan incubator penetas kesejahteraan yang dapat dilakukan melalui penggerak di tingkat desa sampai dengan tingkat propinsi. Akademia Desa sebagai wadah atau tempat masyarakat desa untuk mengomunikasikan tentang rencana pembangunan desa, merupakan jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan masyarakat tinggal di desa. Di dalam Akademia Desa berkumpul semua para penyelenggara desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat Desa atau opinion leader. Para penyelenggara desa berembuk dan saling menguatkan dalam merealisasikan pembangunan desa. Melalui para Penggerak Desa, Koordinator Penggerak Desa, Pembimbing Penggerak Desa, dan Pembina Penggerak Desa, di mana konsep Akademia Desa dapat terwujud yang berdampak kepada tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Akademia Desa, Komunikasi, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) yang selalu mengkaji dan membahas perkembangan dan perubahan kehidupan bernegara. Tulisan ini bukan penelitian akan tetapi hasil pengkajian yang berupa konsep-konsep yang akan diimplementasikan di desa. Akademia Desa bukan perguruan tinggi atau sejenis institusi pendidikan tetapi Akademia Desa merupakan wadah atau tempat berkumpulnya komunitas para penyelenggara desa.

Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jumlah desa di Indonesia ada sebanyak 74.910. Dana Desa pada tahun 2018, sebesar 120 Triliun dan rata-rata per desa mendapat dana 1,4 Miliar/tahun. Dengan jumlah yang demikian besar per desa, diharapkan desa bisa berkembang dan membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya sehingga masyarakat khususnya generasi muda, tidak perlu berurbanisasi untuk mencari pekerjaan. Besarnya jumlah dana yang diterima desa, seharusnya mampu membawa dampak yang signifikan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pemerataan pembangunan desa. Di samping dana yang diberikan kepada desa setiap tahun, maka potensi desa dapat digali seperti pertanian, peternakan, daerah wisata, kuliner desa dan industry produktif desa lainnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat mengelola potensi desa dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat desa.

Penilaian masyarakat tentang desa sering negatif karena desa dinilai oleh sebagian orang masih identik dengan keadaan yang serba berkekurangan dan tertinggal. Misalnya, fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kehidupan masyarakat yang serba berkekurangan, sehingga masyarakat desa menilai bahwa tinggal di desa tidak dapat memberikan kesejahteraan apalagi kebahagiaan. Oleh karena itu, masyarakat desa berlomba-lomba datang ke kota untuk mencari pekerjaan dan akibatnya banyak desa hanya dihuni oleh orang-orang tua karena anak-anak muda kebanyakan merantau ke kota.

Pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa desa tidak dapat mensejahterakan yang tinggal di desa, perlu diubah *mindset*/pola berfikirnya oleh karena dari desa lah pembangunan dimulai. Pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dapat terwujud jika dimulai dari desa. Oleh karena itu, pembangunan bangsa dan negara harus dimulai dari pembangunan desa. Paradigma pembangunan menunjukkan posisi negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. (Agusta, 2014:13)

Salah satu program kerja Presiden Joko Widodo, adalah tentang Nawacita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pada periode kedua pemerintahan presiden, Joko Widodo memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia. Masyarakat yang kompeten, kreatif dan inovatif yang bisa bekerja akan diprioritaskan dalam mengisi lowongan pekerjaan. Masyarakat yang tinggal di desa didorong untuk maju dan membangun desanya sendiri dengan mengelola dana bantuan yang diberikan pemerintah ke desa yang jumlahnya miliaran rupiah setiap tahun. Kemandirian desa sangat diharapkan untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang guna mensejahterakan masyarakat desa.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menggali dan menjelaskan konsep Akademia Desa sebagai satu wadah atau tempat komunitas untuk membicarakan kemajuan desa dengan para penyelenggara desa dan masyarakat desa. Bagaimana masyarakat desa mengelola dan

mengembangkan desanya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, perlu dikomunikasikan dengan penyelenggara desa dan juga masyarakat desa agar tujuan pemberian dana ke desa dapat meningkatkan produktivitas desa, kesejahteraan dan kenyamanan. Oleh karena itulah diperlukan satu wadah, forum atau komunitas untuk membicarakan pembangunan desa. Pendekatan pemecahan masalah adalah dengan pendekatan fenomenologi. Littlejohn and Foss (2005) dalam Jurnal Aspikom (2013) mengungkapkan bahwa: *The Phenomenological tradition concentrates in the conscious experience of the person. Theories in this tradition assume that people activity interpret their experience and come to understand the world by personal experience.*

Metode Pemecahan Masalah

Makalah ini merupakan hasil kajian oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan, maka metode dalam penulisan ini adalah mendeskripsikan secara kualitatif konsep-konsep yang berkaitan dengan Akademia Desa dan bagaimana Akademia Desa tersebut dapat terwujud.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, memiliki batas wilayah serta yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan desa, dibutuhkan Pemerintahan Desa yang baik (*Good Rural Governance*) yakni kehidupan dan pemerintahan desa yang efektif dan efisien, transparan, bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa. Yang termasuk pemangku kepentingan desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang disebut Pemerintahan Desa, warga masyarakat dan para Pengusaha Desa. Untuk merealisasikan pembangunan dan pengembangan desa dimaksud, diperlukan penggerak-penggerak yang bertugas untuk membangun *mindset* warga desa, sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak laku sesuai yang dipersyaratkan bagi warga desa dalam menjalankan fungsinya. (LPPKB, 2019:40).

Mewujudkan Akademia Desa

Ketua LPPKB (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara), bapak Soeprapto, menjelaskan bahwa Akademia Desa bukan suatu lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan tinggi, tetapi merupakan suatu komunitas desa yang memiliki kepedulian dalam membangun desa sehingga desa tidak perlu tertinggal dengan komunitas kota. Komunitas desa terdiri atas para pemeduli desa, para pakar pembangunan desa, para penyelenggara dan pengelola kegiatan desa dan masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian Akademia Desa merupakan suatu komunitas yang terdapat di desa yang memiliki kepedulian pengembangan desa dalam rangka meningkatkan kondisi desa, sehingga desa akan menjadi tempat bermukim yang menyenangkan dan membahagiakan. (Soeprapto, 2019)

Dengan adanya Akademia Desa diharapkan desa dapat membangun sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang diperlukan dan sesuai dengan tuntutan dan keperluan desa. Salah satu contoh bahwa di desa diharapkan tersedia lapangan kerja yang cukup, sehingga tidak perlu terjadi urbanisasi, yang hanya memindahkan permasalahan ke kota. Desa diharapkan mampu menyediakan berbagai kemudahan dan kenikmatan hidup, yang selama ini diduga hanya dapat dinikmati mereka yang bertempat tinggal di kota. Bila program ini dapat berjalan dengan semestinya, bukan mustahil desa akan menjadi tempat bermukim yang lebih nyaman dari pada kota. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa desa adalah **miniatur negara**. Desa memiliki

wilayah, pemerintahan, dan rakyat seperti negara. Jadi membangun desa, berarti membangun bangsa dan negara.(LPPKB,2019)

Dalam upaya mengimplementasikan Akademia Desa, diperlukan pendampingan yang merupakan struktur organisasi pendampingan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Merujuk pada Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, perlu disiapkan tenaga-tenaga untuk merealisasikan pendampingan. Dengan demikian perlu dibentuk penggerak/pendamping-pendamping sebagai berikut (LPPKB, 2019). Dalam tulisan ini, kata pendamping diganti menjadi penggerak oleh karena hanya mendampingi saja tanpa menggerakkan masyarakat desa, tidak akan maju sehingga istilah yang dipakai dalam tulisan ini adalah Penggerak. Struktur Organisasi Penggerak sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- 1) Pembina Penggerak: di setiap propinsi diangkat Pembina Penggerak dengan tugas untuk memberikan arahan atau *direction* kepada Pembimbing Penggerak dalam menjalankan tugasnya. Jumlah Pembina Penggerak di setiap propinsi diusulkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- 2) Pembimbing Penggerak: di setiap Kabupaten/Kota diangkat Pembimbing Penggerak dengan tugas untuk memberikan petunjuk kepada para Koordinator Penggerak dalam menjalankan tugasnya. Jumlah Pembimbing Penggerak diperkirakan berjumlah 5(lima) orang di setiap Kabupaten/Kota.
- 3) Koordinator Penggerak: Di setiap kecamatan dibentuk Koordinator Penggerak yang berjumlah 3 (tiga) orang. Tugas Koordinator Penggerak adalah untuk mensinkronisasi kegiatan yang diselenggarakan oleh para penggerak di Desa/Kelurahan. Seluruh Penggerak, Koordinator Penggerak, Pembimbing Penggerak dan Pembina Penggerak harus memperoleh sertifikat dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Dalam melaksanakan tugasnya di desa, Pembina Penggerak, Pembimbing Penggerak, Koordinator Penggerak dan Penggerak, haruslah orang-orang yang kompeten dalam mengelola desa, sehingga mereka yang terlibat harus memiliki kompetensi yang mumpuni sebagaimana dijelaskan pada uraian berikut.

Kompetensi Penggerak

- a) Seorang Penggerak harus menguasai informasi segala potensi yang ada di desa atau kelurahannya, misalnya mengenai komposisi penduduk desanya, keahlian penduduk desanya, kekayaan alam di desanya, kelemahan yang ada di lingkungan desanya. b). Harus menguasai permasalahan yang dihadapi desanya misalnya, mengenai pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, kebersihan, fasilitas dasar kehidupan, ketertiban, kedisiplinan, keamanan, transportasi dan sebagainya. c) Mampu memilih permasalahan yang *urgent* yang harus segera diselesaikan. d) Memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan *problem solving approach*. e) Mampu menjaga keutuhan negara bangsa dengan memperhatikan kearifan lokal desa. Pengetahuan yang perlu dikuasai Penggerak antara lain: a). Teknik pengumpulan informasi desa, b). Teknik *problem solving approach*. c). Teknik pendekatan *SWOT*, (*Strength, Weakness, Opportunity*), *Threat* d). Pancasila. e). UUD 1945. f). Negara Kesatuan RI dan Bhinneka Tunggal Ika. g). Membangun desa dengan pendekatan Gerbang Indonesia (Gerakan Kebangsaan Indonesia). Sedangkan Kompetensi Koordinator Penggerak, Pembimbing Penggerak dan Pembina Penggerak, dalam garis besarnya, sama dengan Penggerak, hanya lebih luas cakupannya dan ditambah dengan

kemampuan manajemen, yakni Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) dan pemberian *direction, coordination and control*.

Setelah kita memahami apa saja yang perlu dibentuk dalam mewujudkan Akademia Desa, tentu kita pun harus memikirkan apa saja indikator keberhasilan Akademia Desa sebagai wadah atau komunitas dalam memikirkan, membicarakan dan mengomunikasikan antar perangkat desa, maka dapat dijelaskan yang menjadi indikator keberhasilan Akademia Desa antara lain: a) Tersedianya lapangan kerja yang cukup, sehingga tidak perlu warga desa pergi ke tempat lain untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian hidupnya. b) Tersedianya tempat pendidikan dan latihan sebagai bekal bagi tenaga kerja yang diperlukan; c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kehidupan, tempat berteduh, keperluan hidup termasuk sarana dan prasarana fisik/material, pelayanan non fisik, dan pelayanan spiritual; d) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak dan kewajiban manusia dalam menunaikan tugas hidupnya.

Apabila indikator Akademia Desa yang disebutkan di atas terpenuhi, maka dengan terselenggaranya berbagai kegiatan Akademia Desa, akan terwujud masyarakat yang terbebas dari kemiskinan (*no poverty – nir ing nestapa*). Untuk itu perlu diselenggarakan wajib belajar dan wajib kerja (*compulsory education and compulsory working*). Bila hal tersebut dapat terselenggara dengan baik maka akan terbentuk masyarakat yang *no unemployment, no uneducation, no poverty, no hunger, no discrimination*; dan terbentuklah *better human being*. (Soeprato, 2019)

Dengan demikian, Akademia Desa perlu memiliki unit kerja advokasi dan konsultasi yang berfungsi untuk memberikan saran dan petunjuk bagi masyarakat desa dalam membangun desanya. Apabila Akademia Desa ini dapat berjalan, maka desa akan berkembang menjadi Desa Sembada Berwawasan Kebangsaan, suatu desa yang mampu untuk dapat berkembang dengan kekuatan sendiri dengan pola *The Rural Development Initiative (RUDI, LPPKB 2019)*.

Forum Komunikasi Pembangunan Desa

Setelah Akademia Desa, Perangkat Desa, indikator keberhasilan desa dijelaskan di atas, maka yang paling penting adalah bagaimana mengomunikasikannya dengan para penyelenggara desa, pemerintah desa dan masyarakat desa. Manfaat apa yang diperoleh dari komunikasi dan sejauh mana komunikasi memberikan andil kepada kepuasan masyarakat?

Thomas M. Schidel (dalam Mulyana, 2005:4) mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk memengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun tujuan dasar kita untuk berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita. Tujuan komunikasi menurut Gordon I. Zimmerman et al ada 2 yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita dan untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain.

Berkomunikasi dengan sesama perangkat desa menjadi suatu keniscayaan oleh karena bisa menyatukan pendapat, ide dan pikiran dalam membangun desa. Rudolph F. Verdeber mengemukakan bahwa fungsi komunikasi ada dua yaitu. Pertama adalah fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni untuk memutuskan

melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu saat tertentu, seperti, apa yang akan dikerjakan di desa, mana prioritas yang akan dikerjakan, siapa saja yang terlibat, siapa yang melakukan pengawasan dan lain-lain. Karir di segala bidang memerlukan kemampuan seseorang untuk menganalisis situasi komunikasi, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, bekerja sama secara efektif dengan orang lain, dan menerima serta menyajikan gagasan secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi. (Brent.D. Ruben, 2013:5)

Dengan dikomunikasikannya peran masing-masing orang dalam pembangunan desa, diharapkan wadah komunitas ini dapat berjalan dengan baik yang berakibat tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera di desa. Kesamaan pengetahuan dan pengalaman akan membentuk kesamaan kepentingan sehingga terjadi *overlapping of interest* di lingkungan masyarakat desa

Pemahaman tentang desa dan Pembangunan Desa

Jika ditanya seseorang tentang pemahamannya tentang desa, akan beragam jawaban yang muncul karena tergantung dari persepsi seseorang melihat dan menilai sebuah desa. Ada yang mengatakan bahwa desa itu tempat yang menyenangkan. Ada juga yang mengatakan bahwa desa jauh dari keramaian, jauh dari kemoderenan, dan jauh dari hiruk pikuk. Masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa mereka yang bertempat tinggal di desa adalah mereka yang tidak memiliki gairah hidup dan semangat hidup untuk maju. Mereka adalah orang-orang yang berpandangan hidup "*nrimo ing pandum*," menyerah kalah sebelum bertempur. Mereka adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya pada nasib, yang memandang bahwa segala hal ihwal telah ditentukan oleh Tuhan. Tak ada guna usaha itu. Ini merupakan suatu paham fatalistik, determinisme total. Sikap hidup demikian ini yang perlu diubah menjadi komunitas yang kreatif, inovatif, tidak menyerah kalah sebelum bertempur. (LPPKB 2019:41) Akademia Desa merupakan lembaga masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak atau yang biasa disebut *mindset* komunitas desa dari masyarakat yang statis *stereotype* menjadi masyarakat yang maju dan dinamik. Oleh karena itu, desa harus dijadikan sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan.

Desa Sebagai Prioritas Pembangunan

Ada beberapa alasan memilih desa sebagai program utama dalam membangun bangsa dan negara yaitu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Desa atau Kelurahan, merupakan suatu komunitas hukum yang terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti tidak ada satu orang warga negara pun yang tidak tinggal di desa. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kehidupan desa yang masih utuh, tidak berkembang sifat individualistik, warga desa saling kenal dengan baik sehingga kepedulian bersama dapat terselenggara dengan sepatutnya. Dengan kondisi seperti ini kemungkinan berlangsungnya demokrasi asli Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dapat terselenggara dengan baik. Desa tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan. Yang terjadi adalah pembangunan desa bukan pembangunan di desa. Secara langsung ataupun tidak langsung akan terjadi distribusi kewenangan dalam pembangunan. Kesenjangan antara pusat dan daerah dapat

diminimalkan. Dengan berlangsungnya desa sebagai prioritas pembangunan, distribusi modal pembangunan dapat tersebar sampai ke desa-desa. Bila hal ini terselenggara dengan wajar, akan terjadi pemerataan pembangunan yang berakibat pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha yang bermuara kepada pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan Desa akan menyerap tenaga kerja, desa akan berkembang maju, fasilitas kehidupan berkembang di desa, yang berakibat menurunnya dorongan masyarakat untuk berurbanisasi. Pembangunan desa akan mengurangi beban kota. Maka desa akan membuka berbagai lapangan kehidupan. Desa akan berfungsi sebagai sumber kehidupan, sumber pertumbuhan, sumber pelayanan masyarakat yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan. Jika kondisi yang sudah disebutkan di atas dapat terwujud, secara langsung atau tidak langsung, akan berakibat berkembangnya pola pikir yang kita harapkan, yakni terbentuknya karakter dan jatidiri bangsa, yang mencerminkan masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*). Pada akhirnya Desa akan menjadi suatu **lembaga penetas (*incubator*)** bagi kokohnya jatidiri bangsa. Desa akan menjadi pusat dan sumber budaya dan peradaban. Desa merupakan tulang punggung perjuangan, tumpuan akhir pertahanan, dan bela negara. Bila tidak ada desa yang mendukung perjuangan bangsa pada masa revolusi fisik tahun 1945-1950, sangat mungkin negara Indonesia telah hilang dari permukaan bumi.

Hasil dan Pembahasan

Desa sebagai Pemangku Kepentingan Utama Pembangunan

Stakeholder yang kita jadikan primadona dalam pembangunan nasional adalah **desa** dalam kerangka membangun **kebangsaan Indonesia**. Berbicara tentang desa, dimaksud juga kelurahan yang terdapat di kota-kota karena tidak seorang pun bangsa Indonesia yang tidak tinggal di desa/kelurahan. Perhatian pemerintah khususnya presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari daerah pinggiran, dari desa sehingga desa perlu dipikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya melalui penyelenggara desanya, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila berisi prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, yang bermakna dalam hidup bersama mengutamakan terjalinnya kepedulian, tenggang rasa, kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri. Eksistensi diri diabdikan untuk dapat memberikan pelayanan pada pihak lain. Untuk itu, sangat diperlukan komunikasi yang baik di antara *stakeholder* dalam membangun desa.

Dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, individu sebagai pribadi tidak dijadikan primadona dalam pembangunan. Hal ini berarti dalam pembangunan tidak mengabdikan pada eksistensi dan kepentingan pribadi, tetapi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa dalam hal ini, tidak berarti bahwa individu tidak diperhitungkan dalam pembangunan, individu didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang merdeka, setara, tetapi selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak lain. Meskipun dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia berpegang pada prinsip kekeluargaan, hal ini tidak berarti bahwa keluarga dijadikan *stakeholder* utama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip kekeluargaan memberi makna bahwa dalam hidup bersama, masing-masing anggota komunitas memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang terikat dalam suatu gerak kebersamaan. Kekeluargaan tidaklah bermakna, bahwa kalau seorang kepala keluarga menjadi pejabat tertentu, maka anggota keluarga memiliki hak untuk meneruskan jabatan tersebut, atau menjadi wakil/pejabat dalam lingkungan tersebut. Dengan demikian maka **hakikat Negara Republik Indonesia ialah Desa** yang sangat besar dengan unsur-unsur modern. Apabila Desa merupakan perwujudan berorganisasinya orang-orang

perorangan melalui keluarga-keluarga ke dalam bentuk paguyuban-paguyuban masyarakat, maka Negara Republik Indonesia merupakan perwujudan berorganisasinya paguyuban-paguyuban masyarakat itu ke dalam bentuk negara. (A. Hamid S.Attamimi)

Untuk merealisasikan desa sebagai primadona pembangunan tidaklah mudah, diperlukan sumberdaya manusia yang profesional. Sumberdaya manusia ini kita temukan di dalam Akademia Desa yang merupakan wadah atau tempat komunitas berkumpul di desa mulai dari para penyelenggara desa, pemerintahan desa, masyarakat desa yang memikirkan bagaimana pembangunan desa yang akan dikerjakan. Akademia Desa ini dapat menampung aspirasi masyarakat yang dijadikan sumber dalam mewujudkan pembangunan desa. Pembangunan desa akan bisa direalisasikan jika penggerak ditempatkan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan/kota sampai propinsi . Jika penggerak ini berjalan serentak tidak mustahil pembangunan desa menjadi incubator penetas kesejahteraan dan dapat mencerminkan desa sebagai miniatur negara. Dengan dikomunikasikannya pembangunan desa, maka terdapat kesamaan pemikiran dan kesamaan pengalaman yang mengakibatkan terdapat kesamaan kepentingan dalam membangun desa.

Kesimpulan

Dengan terbentuknya Akademia Desa sebagai wadah atau tempat komunitas berkumpul dan bermusyawarah antara penyelenggara desa, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat desa, dapat memikirkan, mengomunikasikan, dan mengambil keputusan dalam menyelenggarakan semua yang terkait dengan pembangunan desa. Academia Desa dapat terwujud dengan menempatkan Pembina Penggerak di tingkat propinsi, Pembimbing Penggerak di Kabupaten/Kota, Koordinator Penggerak di kecamatan, dan Penggerak di desa yang kompeten, dan dapat saling bersinergi mengomunikasikan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dengan demikian, Akademia Desa merupakan jawaban atau tempat yang dapat menampung aspirasi masyarakat dan penyelenggara desa dalam membangun desa sehingga tujuan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dapat diwujudkan melalui desa sebagai miniatur negara dan sebagai *incubator* penetas kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- [1] Agusta Ivanovich,(2014). Indeks kemandirian Desa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- [2] Brent D. Rubent I Leap. Stewart, (2013). Komunikasi dan Perilaku Manusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [3] Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), (2006) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- [4] _____(2019), Pedoman Umum Pembangunan Pancasila, Jakarta: LPPKB
- [5] Littlejohn W. Stephen and Foss A Karen , (2005), Theories of human communication, Spain: Thomson, Wadworth
- [6] Mulyana Dedy, (2005). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [7] Soeprapto,(2016). Desa Sembada Berwawasan kebangsaan, Jakarta: *LPPKB*
- [8] _____(2019). Akademia Desa. Jakarta: LPPKB

Peraturan-Peraturan Pemerintah

- [9] Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa
- [10] Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Jurnal

- [10] Jurnal Komunikasi (2013) ISSN 2087-0442, Vol. 1 Nomor 6